



**RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA KELAS I PALU**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rupbasan Kelas I Palu Tahun 2023 dapat tersusun dan disajikan dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Palu selama satu tahun anggaran. Melalui LKjIP ini, kami ingin memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Dalam tahun 2023 Rupbasan Kelas I Palu berfokus pada beberapa pencapaian yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja pada awal Tahun 2023 Dengan kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran, kami berhasil mencapai beberapa target yang telah ditetapkan.

Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan yang perlu dibenahi seperti Eksekusi Barang Inchracht yang masih berada di bawah target Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

LKjIP ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal Rupbasan Kelas I Palu.

Pada akhirnya Kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 29 Desember 2023
Kepala Rubasan Kelas I Palu



Usman, S.Sos

Nip. 1919660705 199403 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/ bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja periodik yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Keberhasilan kinerja adalah pencapaian sasaran/target dan tujuan organisasi dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekankan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

LKjIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk selama tahun anggaran 2023. LKjIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Rupbasan Kelas I Palu. Berikut kami sampaikan Ikhtisar dari laporan ini :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa
- Tingkat kepuasan pengguna jasa meningkat
 - Peningkatan keamanan dan keselamatan barang titipan
 - Terlaksananya pelatihan pengamanan barang titipan bagi seluruh pegawai Rupbasan Kelas I Palu.
 - Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pengamanan barang titipan.
- b. Peningkatan sinergitas dengan instansi terkait
- Terjalannya kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk meningkatkan pengamanan barang titipan.
 - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan barang titipan.
- c. Kendala yang dihadapi
- Kurang tersedianya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.
 - Kurang tersedianya tenaga teknis yang kompeten.
 - Instansi APH Terkait yang kurang aktif dalam melaksanakan eksekusi Basan/Baran yang mengakibatkan Beberapa Barang yang sudah Inchracht masih belum dilaksanakan Eksekusi
- d. Upaya perbaikan yang dilakukan

Rupbasan Kelas I Palu telah Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan anggaran. Selain itu Rupbasan telah Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ikut menciptakan tenaga teknis yang kompeten .

Pada tahun akhir tahun 2023 Rupbasan Kelas I Palu mampu mencapai realisasi hingga 99,92% , senilai 2.809.526.610 sesuai data dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesai .

Rupbasan Kelas I Palu telah berhasil mencapai capaian kinerja yang baik dalam tahun 2023. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi. Rupbasan Kelas I Palu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana Rupbasan dan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Rupbasan.

Rupbasan Kelas I Palu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa dan meningkatkan keamanan dan keselamatan barang titipan. Rupbasan Kelas I Palu juga berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Profil Pejabat.....	3
4. Aspek Strategis.....	4
5. Isu Strategis	4
6. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Kinerja.....	8
2. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	17
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	18
1. Aplikasi SMART DJA	18
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	19
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	20

1. E-Performance.....	21
2. E-Monev.....	21

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	21
B. Saran.....	22
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu satuan kerja. Setiap satuan kerja tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja, terdapat empat siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah Monitoring dan Evaluasi. Umumnya, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik.

Dalam melaksanakan kinerjanya, Rupbasan Kelas I Palu mengacu kepada Perencanaan Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI dan Renstra Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan (2020-2024).

Terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja, yang pertama adalah sebagai sarana menyampaikan informasi. pegawai bisa menyampaikan capaian kinerja terbaru dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kedua, sarana pengumpulan ide. Seringkali ketika berkumpul bersama tertuang ide-ide baru yang bisa menjadi gebrakan dalam pencapaian kinerja yang efektif dan optimal. Ketiga, sebagai forum demokrasi. Seluruh pegawai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun suara dalam penyampaian informasi. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi, pegawai dapat menyampaikan hambatan yang ditemui dalam pencapaian target. Di sini dibahas alternatif yang bisa dilakukan dalam pencapaian target. Monitoring dan Evaluasi yang baik dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalah yang tepat dan akurat.

Monitoring dan evaluasi (monev) mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan suatu sistem manajemen kegiatan. Capaian Kinerja setiap bulan dibandingkan terhadap rencana/target untuk

memperoleh gambaran mengenai tercapainya atau tidaknya target kinerja. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target kinerja dapat dilihat salah satunya pada aplikasi e- Performance. E- Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja Rupbasan Kelas I Palu. Aplikasi E- Performance ini diharapkan dapat memberikan data hasil analisis capaian kinerja beserta alternatif bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

2. Tugas dan Fungsi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara. Rupbasan dipimpin oleh seorang Kepala Rupbasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) setempat.

Tugas pokok Rupbasan adalah melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara. Sedangkan fungsi Rupbasan adalah:

- a) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara

Pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan penyimpanan dokumen-dokumen terkait benda sitaan dan barang rampasan negara.

- b) Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara

- c) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi kegiatan menjaga keamanan, kebersihan, dan keutuhan benda sitaan dan barang rampasan negara. Mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi kegiatan perpindahan benda sitaan dan barang rampasan negara dari satu tempat ke tempat lain.

- d) Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan

Pengamanan Rupbasan meliputi kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rupbasan. Pengelolaan Rupbasan meliputi kegiatan pendayagunaan sarana dan prasarana Rupbasan.

3. Profil Pejabat

a. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

	Nama	: Usman, S.Sos
	NIP	: 19660705 199403 1 003
	Tempat, dan Tanggal Lahir	: Donggala, 05 Juni 1966
	Agama	: Islam
	Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none">• S1 Administrasi Negara STISIPOL, 1994
Riwayat Pekerjaan		
		<ul style="list-style-type: none">• Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu (Juni 2020 - Sekarang)• Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Palu (Maret 2018 s.d Juni 2020)• Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Kelas IIA Palu (April 2014 s.d Maret 2018)• Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Palu (April 2006 s.d April 2014)• Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Lapas Kelas IIA Palu (Agutsu 2002 s.d April 2006)

b. Kepala Sub Seksi Administrasi dan pemeliharaan

	Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan	
	Nama	: Tricipto, S.Sos
	NIP	: 197305031994031001
	Tempat, dan Tanggal Lahir	: Toli-Toli, 03 Mei 1973
	Agama	: Islam
	Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none">• S1 Administrasi Negara Stisipol Panca Bhakti Palu, 2003
Riwayat Pekerjaan		
		<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Seksi dan Administrasi Pemeliharaan(Desember 2020 s.d Sekarang)• Ka. Subsidi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Palu (Februari 2020 s.d Desember 2020)• Kepala Subsidi PengelolaanRutan Kelas IIA Palu (Februari 2014 s.d Februari 2020)

c. Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan

	Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan
Nama	: Johnson
NIP	: 196906271990031001
Tempat, dan Tanggal Lahir	: Palu, 27 Juni 1969
Agama	: Kristen
Pendidikan	
• S1 Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah, 0	
Riwayat Pekerjaan	
• Ka. Subsi Pengamanan dan Pengelolaan(April 2021 s.d Sekarang)	
• Ka. Subsi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Kelas IIA Palu (Januari 2017 s.d April 2021)	
• Kepala Subsi Registrasi LP Kelas Samarinda (September 1991 s d Desember 1997)	

4. Aspek Strategis

Rupbasan merupakan lembaga yang penting dalam proses peradilan. Benda sitaan dan barang rampasan negara yang disimpan di Rupbasan dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Rupbasan harus dikelola dengan baik agar keamanan dan keutuhan benda sitaan dan barang rampasan negara dapat terjamin.

Rupbasan Kelas I Palu memiliki 3 orang pejabat dan 29 Staf bagian teknis dan non teknis. Saat ini Rupbasan Palu Memiliki 8.327 jumlah Item Basan/Baran yang Terdaftar dari 40 Nomor Register yang Hasil nilai Takasiranya jika dirupiahkan Mencapai Rp. 34.351.467.081.

5. Isu Strategis

Isu strategis Rupbasan yang dapat menghambat kinerja antara lain:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas

Rupbasan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, seperti lahan yang terbatas, gudang yang tidak memadai, dan peralatan yang kurang lengkap. Hal ini dapat menghambat kinerja Rupbasan dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

b. Kurang optimalnya sistem administrasi

Sistem administrasi Rupbasan masih belum optimal. Hal ini dapat menghambat kinerja Rupbasan dalam hal pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara.

6. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas I Palu berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas I Palu adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan

kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjiasn Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

1. Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	---	------	---	------------------------------

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti pelaporan kinerja pada aplikasi E-Performance, aplikasi kinerja.kemenkumham.go.id , aplikasi e-Monev BAPPENAS.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran - lampiran :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian kinerja tahun yang akan datang;

Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Kinerja

Rencana kerja pada Satuan Kerja Rupbasan Kelas I Palu sudah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pencapaian Pada Akhir Tahun 2023 ini, Adapun langkah – langkah percepatan yang akan dilakukan untuk memperoleh penyerapan anggaran yang optimal, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan ;
- b. Meningkatkan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- c. Pergunakan cash card agar lebih mudah dalam melakukan pembayaran;
- d. Meningkatkan monitoring secara berkala agar mendapatkan hasil yang optimal.

2. Perjanjian Kinerja

Rencana kerja pada Satuan Kerja Rupbasan Kelas I Palu sudah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja. Target yang harus dicapai sampai dengan Akhir Tahun 2023 ini, yaitu sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pamasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 136.356.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 136.356.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.536.690.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.536.690.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Proses capaian kinerja yang telah dilakukan Kantor Rupbasan Kelas I Palu Pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan / Baran di Wilayah sesuai standar	a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80	80	100%
		b. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80	40	50%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1	1	100%
		b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1	1	100%
		c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasaryakatan	1	1	100%
		d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1	1	100%
		e. Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	100%
		f. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	100%

Pada Akhir Tahun 2023 Kinerja Rupbasan Kelas I Palu tercatat memenuhi target kinerja bahkan pada beberapa indikator kinerja tercatat **Lebih Baik** dari Target yang telah di tentukan pada perjanjian Kinerja yang di tanda tangani oleh Kepala Rupbasan Kelas I Palu diawal tahun.

a. SK.1.IKK.1 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4
a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80	80	100%

• Capaian

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui pripsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selasai karena orang tersebut belum tentu bersalah. Sehingga diharuskan untuk menjaga kualitas dan kuantitas basan baran dengan perawatan dan pemeliharaan agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tetap dijaga agar terhindar dari kehilangan.

Rupbasan Kelas I Palu bertekad menjadi salah satu pendorong Penegakan Hukum dengan cara menjaga Kualitas barang sitaan yang dititipkan. Maka dari itu Rupbasan Menjaga Kualitas Basan/Baran dengan Baik. Saat ini Rupbasan Palu Menampung 8.327 Item Barang yang di dominasi oleh Kayu hingga saat ini .rupbasan berhasil menjaga Kualitas dan kuantitas 7.934 item barang , beberapa barang mengalami penyusutan seperti minyak solar dan kayu yang mulai lapuk di makan usia . Berikut perhitungan Persentase dari Barang yang terjaga kualitasnya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
JUMLAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
 Jalan Keselamatan No. 91, Tanjung Palu Utara - Telp/Fax: 0451-492111
 Laman : <http://www.humas.go.id/palu> Email: rupbasanpalu@kpk.go.id

LAPORAN DESEMBER 2023

JUMLAH BENDA SITAAN BERDASARKAN STATUS HUKUMNYA PENYIDIKAN (RBS 1) : 18 REGISTER PENUNTUTAN (RBS 2) : 22 REGISTER PENYADAPAN (RBS 3) : 0 REGISTER BANDING (RBS 4) : 0 REGISTER KASASI (RBS 5) : 0 REGISTER RAJUKASAN NEGARA : 0 REGISTER PENJENJAJAN : 0 REGISTER PENJENJAJAN : 0 REGISTER	JUMLAH BENDA SITAAN BERDASARKAN PENEMPATANYA GUDANG TERBUKA 18 REGISTER GUDANG TER TUTUP 18 REGISTER GUDANG SEDIKITA 4 REGISTER GUDANG BERBANYAK 3 REGISTER GUDANG REWAR/TUMBUHAN 0 REGISTER GUDANG LUAR RUPBASAN 0 REGISTER	KLASIFIKASI BASAN MOBIL : 12 UNIT MOTOR : 24 UNIT TANAH/BANGUNAN : 0 KAPAS : 4531 BATANG LOGAM MULSA : 0 BOM : 0 ALAT BERAT : 2 UNIT LAIN-LAIN : 372 BARANG
NILAI TAKSIRAN : Rp 34,351,467,081		
BENDA SITAAN KORUPSI MENARIK PERHATIAN PUBLIK MOBIL : 0 MOTOR : 0 TANAH/BANGUNAN : 0 LAIN-LAIN : 0	JUMLAH PEGAWAI KEPALA RUPBASAN : 1 ORANG PEJABAT STRUKTURAL : 2 ORANG STAFF : 25 ORANG	MENGETAHUI KEPALA RUPBASAN KELAS I PALU USMAN, S.SI NIP. 19860708 1984 01 1008

Logos: CIVIL SERVICE, BerAKHLAK

= Jumlah item barang yang terjaga Kualitasnya /Jumlan item barang di dalam Rupbasan x 100%
= 7.934/8.327 x 100%
= 95%

Yang jika di persentasikan capaiannya sebagai berikut :

= Realisasi/target x 100%
= 95/80 x 100% = **118%**



Dokumentasi Pemeliharaan Basan/Baran pada Rupbasan

- ***Analisa Penyebab Keberhasilan dan Alternatif yang dilakukan***
 1. Peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan bersertifikat bagi pegawai RUPBASAN terkait pemeliharaan Basan sehingga pegawai yang tersedia mengerti bagaimana cara dalam proses pemeliharaan
 2. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan basan/baran selama Tahun 2024 sehingga kualitas dan Kuantitas basan/baran tetap terjaga dengan baik
 3. Melakukan koordinasi secara berkala terhadap pihak ke-3 dalam perawatan basan/baran yang membutuhkan perawatan khusus

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	80%	100%	80%	80%	100%

Jika di bandingkan dengan tahun lalu Rupbasan Kelas I Palu menyamai persentase tahun lalu dan mencapai angka 100%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka menengah dalam Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
a	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70	75	80	100

b. **SK.1.IKK.2 Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4
b. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80	40	50%

- **Capaian**

Benda Sitaan dan Barang Rampasan harus di keluarkan sesuai dengan Putusan Pengadilan demi menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia , tetapi kami mengalami beberapa kendala dalam eksekusi basan/baran yang ada pada kami , hal ini di karenakan kurang aktifnya pihak pelaksana putusan dalam eksekusi basan/baran yang telah berkekuatan hukum tetap, Pada tahun 2023 Rupbasan memiliki 8 (delapan) Nomor Registrasi yang belum di eksekusi, Berikut Perhitungan Persentasinya :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah Basan dan Baran yang berkekuatan hukum tetap} / \text{Basan dan Baran yang di eksekusi} \times 100\% \\
 &= 5/12 \times 100 \% \\
 &= 41 \%
 \end{aligned}$$

Yang jika di persentasikan capaiannya sebagai berikut :

= Realisasi/target x 100%

= 41/80 x 100% = **50%**



Dokumentasi Eksekusi Basan/Baran

• **Analisa Penyebab Kegagalan dan Alternatif yang dilakukan**

1. Kegagalan Eksekusi Basan/baran yang telah inchrah dikarenakan kurang aktifnya stakeholder pelaksana putusan pengadilan dalam eksekusi basan/baran yang telah inchrah.
2. Melakukan koordinasi secara berkala terhadap pihak ke-3 dalam Eksekusi Basan/Baran yang telah inchrah dan akan meningkatkan kinerja dalam proses eksekusi.
3. Memberikan edukasi pada Petugas Rupbasan untuk meningkatkan Proses eksekusi basan/baran

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
b	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%	78	98%	80	40	50%

Jika di banding dengan tahun lalu Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap masih sangat minim dikarenakan kurang aktifnya stakeholder dalam melaksanakan eksekusi basan/baran yang sudah inchrah

- **Perbandingan Realisasi Kinerjadengan Target Jangka menengah dalam Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
b	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	70	80	80	100

c. SK.2.IKK.1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1	1	100%

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi.

Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

d. SK.2.IKK.2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1	1	100%

Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II.

Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

e. SK.2.IKK.3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1	1	100%

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi Back to Basic

Back to Basic adalah kembali pada pedoman dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita yang telah diterapkan. Sehingga insan Pemasyarakatan harus secara sadar memikirkan, merasakan, dan merenungkan apakah yang berjalan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ini menjadi titik balik pentingnya dilakukan reformasi birokrasi Pemasyarakatan dengan menerapkan nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).

2. Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD)

Kegiatan FMD adalah sebuah kegiatan dalam rangka pembentukan kepatuhan terhadap peraturan, karakter, fisik, mental, dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kegiatan FMD ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng yang diikuti oleh Anggota Jaga.

f. SK.2.IKK.4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1	1	100%

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan didampingi oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat.

Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

g. SK.2.IKK.5. Jumlah Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
e. Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	100%

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rupbasan Kelas I Palu . Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

h. SK.2.IKK.6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
f. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	100%

Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi mencapai target 1 layanan ini berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawai rupbasan . seperti paket computer dan laptop untuk melaksanakan tugas .

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pada Akhir Tahun 2022 Realisasi anggaran Organisasi Kami yaitu senilai Rp.2.809.526.610 dari Total anggaran Rp2.813.659.000 atau sekitar **99,88%**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	632663 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	PAGU	1,711,613,000	1,002,046,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	2,813,659,000
		REALISASI	1,710,005,676 (99.91%)	1,001,087,440 (99.99%)	98,178,750 (98.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,810,171,866 (99.88%)
		SISA	1,607,324	58,560	1,821,250	0	0	0	0	0	0	3,487,134
GRAND TOTAL		PAGU	1,711,613,000	1,002,046,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	2,813,659,000
		REALISASI	1,710,005,676 (99.91%)	1,001,987,440 (99.99%)	98,178,750 (98.18%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,810,171,866 (99.88%)
		SISA	1,607,324	58,560	1,821,250	0	0	0	0	0	0	3,487,134

Sementara itu Pada Akhir Semester II Tahun 2023 Realisasi Anggaran Pada Rupbasan Kelas I Palu Yaitu senilai Rp. 2.809.526.610 atau **99,92%** dari total anggaran yang diberikan pada awal tahun 2023 yang berjumlah Rp.2.811.670.000 ,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	PAGU	1,776,716,000	1,025,873,000	9,081,000	0	0	0	0	0	0	2,811,670,000
		REALISASI	1,774,573,976 (99.88%)	1,025,871,634 (100.00%)	9,081,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,809,526,610 (99.92%)
		SISA	2,142,024	1,366	0	0	0	0	0	0	0	2,143,390
GRAND TOTAL		PAGU	1,776,716,000	1,025,873,000	9,081,000	0	0	0	0	0	0	2,811,670,000
		REALISASI	1,774,573,976 (99.88%)	1,025,871,634 (100.00%)	9,081,000 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,809,526,610 (99.92%)
		SISA	2,142,024	1,366	0	0	0	0	0	0	0	2,143,390

Berdasarkan gambaran di atas Realisasi anggaran Tahun 2023 tercatat sekitar 0,04% **Lebih Baik** dari tahun sebelumnya.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berikut kami sampaikan Capaian kinerja anggaran Pada Rupbasan Kelas I Palu Berdasarkan 2 (dua) variable, yaitu pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Aplikasi SMART DJA

Aplikasi MART DJA adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pada Aplikasi SMART DJA Tercatat Sangat Baik dengan Hasil hingga **99,53%** yang berarti Kinerja Keuangan pada organisasi kami berjalan baik



Dengan Hasil **SANGAT BAIK** seperti di atas Rupbasan Palu berarti mampu mengelola dan bertanggung jawabkan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan yang ada, demi menciptakan tekad pemerintah yang bersih dan transparan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Pada akhir tahun 2023 Rupbasan Kelas I Palu mendapatkan nilai yang cukup tinggi yaitu 99,09% seperti yang terlihat pada aplikasi IKPA

NO	KODE KPPN	KODE DA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI ASPEK NILAI ASPEK TOTAL/CONVERSI BOBOT		
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN BERSAMA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	RELEASASAN BAGIAN	PENGELUARAN UPJAMA TUP	DISPENSASI IPM	CAPAIAN OUTPUT	NEAR TOTAL		CONVERSI BOBOT	
1	051	013	032003	RUBAH PENYIMPANAN BENDA STAAN NEGARA PALU	Baru	100.00	94.00	100.00	100.00	100.00	96.82	100.00	100.00	99.09	100%	99.09	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	3	25				
					Nilai Aspek	10.00	9.40	20.00	10.00	10.00	9.68	3.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.03				99.58			100.00				

D. CAPAIAN KINERJA LAINYA

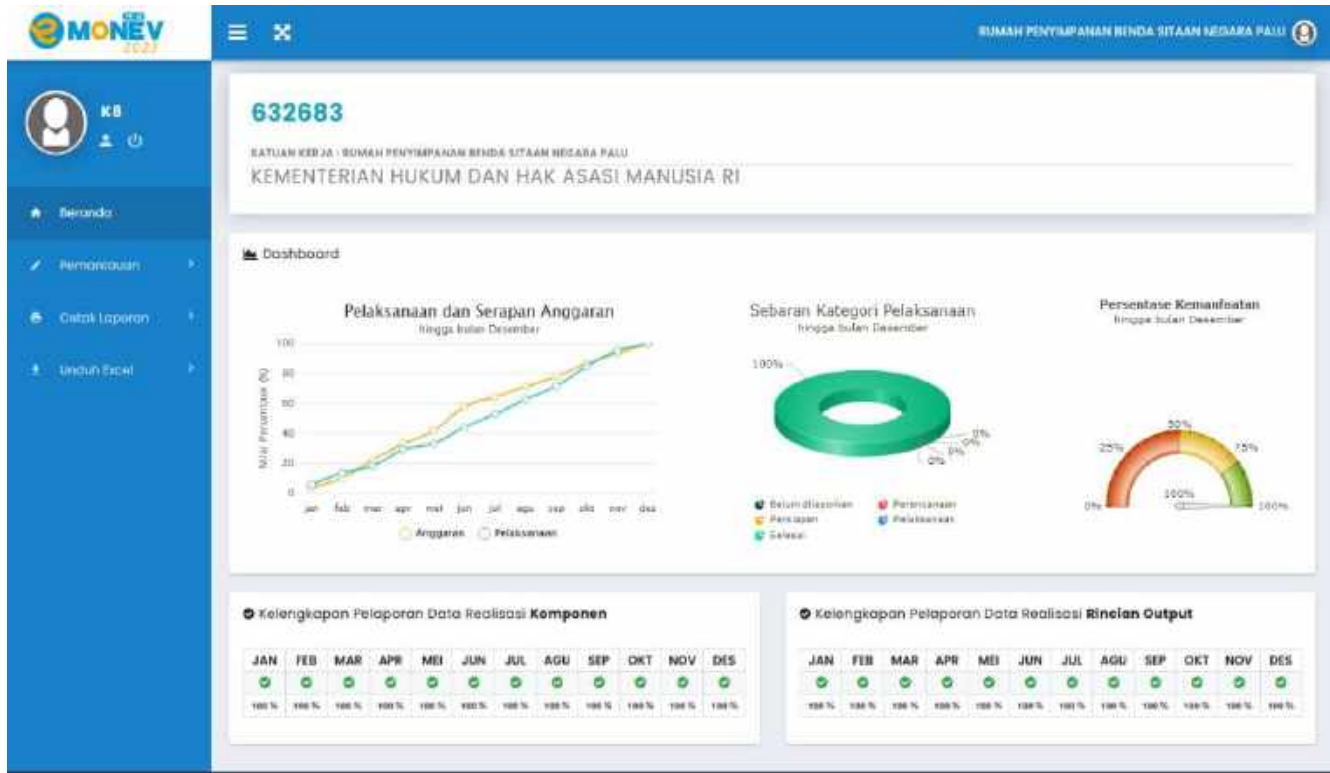
1. E-Performance

Aplikasi E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Pada Aplikasi E- Performance Rupbasan Kelas I Palu Tercatat mencapai angka yang , hanya saja memang masih ada beberapa capaian yang tidak mencapai angka 100 % karena kurang aktifnya stake holder dalam melaksanakan putusan pengadilan , hal ini mengakibatkan penumpukan Basan/Baran pada Gudang Rupbasan Kelas I Palu, Namun Untuk memperbaiki hal tersebut kami akan mengantisipasi dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan APH terkait.

2. E-Monev

Aplikasi E-Monev adalah aplikasi milik Kementerian PPN/BAPENAS yang merupakan salah satu instrument PEPP yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Aplikasi E- monev ini juga sebagai alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi

pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN. Pada Aplikasi E-Monev Rupbasan Kelas I Palu mencapai 100% Berikut Realisasi dari Rupbasan Kelas I Palu



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rupbasan Kelas I Palu Mencapai Beberapa Target Kinerja contohnya pada bidang keuangan yang Penyerapan Mencapai Hampir 100%. Begitu pula dalam perawatan Basan/Baran yang mencapai target sehingga kepercayaan stakeholder juga naik di banding tahun lalu dan terus menitipkan Basan/Baranya kepada Rupbasan Kelas I Palu

Di akhir Tahun 2023 ini Rupbasan Kelas I Palu menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai Peringkat ke-2 UPT. Dengan Belanja Barang

Terbaik. Yang menunjukkan tekad kami untuk menjadi lebih baik dan bijak menggunakan anggaran yang ada.

Pada dasarnya Rupbasan Kelas I Palu Telah Berhasil mencapai kinerja Terbaik dan mencapai Target kinerja yang telah di tentukan Baik dalam bidang Teknis, Keuangan dan capaian kinerja lainnya. Tetapi kami sadari bahwa kami masih memiliki beberapa kekurangan dalam Kinerja tahun 2023 ini khususnya pada Eksekusi Basan/Baran yang hanya Mencapai 50% hal ini di karenakan Kurangnya Keaktifan Stakeholder dalam Proses Eksekusi Basan/Baran yang sudah inchrah.

B. SARAN

Kantor Rupbasan Kelas I Palu dalam melakukan pelayanan dan perencanaan yang baik dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalah yang tepat dan akurat. Berikut Strategi yang akan Kami Lakukan dalam meningkatkan pelayanan Pada Organisasi kami demi mendukung pemerintahan yang bersih dan berkualitas :

- Meningkatkan kualitas perencanaan ;
- Meningkatkan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- Terwujudnya kegiatan pengadministrasian, pemeliharaan dan mutasi Basan Baran yang tertib dan aman;
- Meningkatkan monitoring secara berkala agar mendapatkan hasil yang optimal.
- Terselenggaranya koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
- Meningkatkan Kerjasama dengan para APH terkait Penitipan dan pemeliharaan

LAMPIRAN



Kerja Sama dengan Stakeholder



Penerimaan Penghargaan Realisasi Anggaran Belanja Terbaik Ke-2 oleh Kantor Wilayah